

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan integral dalam arti sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Mengingat peran dan kedudukannya pembangunan daerah harus dilaksanakan secara serasi, selaras, dan seimbang serta diarahkan agar dapat berlangsung berhasil dan berdaya guna pada seluruh tingkat administrasi pemerintah.

Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat Indonesia sesuai nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya. Pembangunan nasional juga merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Kegiatan pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ini merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik

Yang menjadi tantangan dan permasalahan yang dihadapi yaitu : (1) Jumlah penduduk yang makin besar. (2) jati diri bangsa mulai pudar. (3) pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas. (4) kurang kontribusi IPTEK. (4) penyediaan sarana dan prasarana secara tidak merata. (5) kekuatan pertahanan dan

keamanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal. (6) tata ruang tidak sesuai peruntukan. (7) ancaman krisis pangan dan energi. (8) proses konsolidasi demokrasi. Pembangunan dalam lingkup spasial tidak selalu berlangsung secara merata. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat sementara daerah lain sebaliknya. Perbedaan akselerasi pertumbuhan disetiap daerah diantaranya disebabkan oleh perbedaan ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun prasarana dan sarana penunjang yang lain.

Rodinelli (dalam Koestoner ,1983) mengungkapkan bahwa pembangunan suatu perkotaan tidak bisa terlepas dari suatu perencanaan, karena perencanaan menjadidasar dari pembangunan. Tanpa perencanaan pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik dan hasilnya tidak memuaskan seperti yang diharapkan atau tidak mencapai tujuan pemerintah. Perencanaan tata ruang dapat memecahkan pembangunan wilayah dalam hal ini perbedaan dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta adanya perbedaan tingkat pendapatan dan kemakmuran daerah.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan, industri dunia, dan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan jasa pelayanan masyarakat akan meningkat karena manusi semakin membutuhkan kenyamanan dan kemudahan mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Sehingga keberadaan fasilitas umum sebagai sarana penyedia jasa yang bergerak dalam berbagai bidang terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam bidang penyedia sarana fasilitas sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, air bersih, rumah ibadah, perumahan, dan keamanan. Kemudian dalam bidang penyedia sarana fasilitas

sekonomi yang mencakup pasar, toko, kios, warung, bank, reparasi (Sjafrizal, 2012)

Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ketahun juga berpengaruh terhadap pengembangan pembangunan suatu bangsa. Jumlah penduduk yang besa memerlukan berbagai fasilitas baik sosial dan ekonomi dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang. Dengan demikian pembangunan itu memberikan hasil bagi kehidupan penduduk, tetapi pembangunan itu belum merata diberbagai bidang termasuk dalam sektor fasilitas sosial ekonomi.

Permasalah itu timbul disebabkan oleh (1) terbatasnya jumlah kualitas sarana dan prasarana yang kurang menunjang kegiatan ekonomi, (2) kurangnya program pembangunan yang disediakan, (3) lemahnya sumber pembiayaan dan kurang kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, (4) rendahnya kualitas dan kemampuan sumberdaya manusai untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, (5) masih lemah koordinasi antar intasnai pemerintah terkait dalam penyunan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana Rahardjo Adisasmita (dalam Sjafrizal, 2012) Dalam mengatasi masalah yang terjadi, pemerintah telah melaksanakan pembangunan secara desentralisasi artinya bahwa setiap daerah diberi wewenang untuk mematuhi dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kepentingan daerahnya agar terwujud pemerataan pembangunan.

Keadaan tersebut tidak terlepas dari penduduk di Indonesia yang masih memiliki jumlah yang besar, ini ditunjukkan data penduduknya pada tahun 2010 berjumlah 233.850.990 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010). Dengan jumlah penduduk yang besar harus diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana

jika hal ini tidak seimbang atau tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah bagi pemerintah yang bersangkutan dalam usaha untuk membangun serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya.

Pada umumnya kota provinsi dan kabupaten/kota mengalami pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan berbagai fasilitas pelayanan sosial yang mencakup prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, olah raga dan keagamaan. Demikian juga dengan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan ekonomi meliputi pasar, toko, warung, bank, angkutan umum, dan fasilitas pelayanan telepon (Tarigan, 2006).

Kecamatan Salak merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan ibukota kabupaten. Jumlah penduduk di Kecamatan Salak terus mengalami pertumbuhan penduduk tahun 2011 jumlah penduduk kecamatan Salak 7.360 jiwa (kantor camat 2012). Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk tersebut maka kebutuhan akan fasilitas pelayanan ekonomi penduduknya juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu perlu dikaji Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Ekonomi di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat.

B. Identifikasi Masalah

Jumlah penduduk yang besar tentunya akan menimbulkan masalah terhadap ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan. Masalah itu timbul disebabkan oleh penyediaan fasilitas yang kurang memadai karena fasilitas yang dibangun tidak seimbang dengan jumlah penduduk.

Untuk itu perlu dikaji tentang memenuhi fasilitas pelayanan ekonomi fasilitas pelayanan pasar, toko, kios atau warung, reparasi sepeda motor, bank, kuantitas jalan, angkutan umum, dan fasilitas pelayanan telepon yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk.

C. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya cakupan tentang fasilitas pelayanan ekonomi, maka dalam penelitian ini dibatasi masalahnya agar jelas dan terarah. Adapun masalah yang dibatasi dalam fasilitas pelayanan ekonomi adalah fasilitas pelayanan pasar, toko, kios atau warung, reparasi sepeda motor, dan fasilitas pelayanan bank.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- 1) Bagaimana ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi (fasilitas pasar, toko, kios atau warung, reparasi sepeda motor dan fasilitas bank) di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat ?
- 2) Bagaimana tingkat aksesibilitas wilayah di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat?

E. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi (fasilitas pasar, toko, kios atau warung, reparasi sepeda motor dan fasilitas bank) di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat
- 2) Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat

F. Manfaat Penelitian

- 1) Memberikan gambaran tentang ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi dan tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan Salak sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain
- 2) Memberikan gambaran tentang bagaimana ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan ekonomi dalam perkembangan wilayah yang ada di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat
- 3) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam penyediaan pembangunan fasilitas pelayanan ekonomi yang dilakukan.
- 4) Sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana (S1) Pendidikan geografi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.